

MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH : TEORI DAN PRAKTIK

Moh. Rasyid, S.E., M.M

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana paling lama 7 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH : TEORI DAN PRAKTIK

Moh. Rasyid, S.E., M.M



YAYASAN PUTRA ADI DHARMA

MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH : TEORI DAN PRAKTIK

Penulis :

Moh. Rasyid, S.E., M.M

ISBN : 978-634-7314-16-1

IKAPI : No.498/JBA/2024

Editor : Umi Safangati Hidayatun

Penyunting :

Yayasan Putra Adi Dharma

Desain sampul dan Tata letak

Yayasan Putra Adi Dharma

Penerbit :

Yayasan Putra Adi Dharma

Redaksi :

Wahana Pondok Ungu Blok B9 no 1, Bekasi

Office Marketing Jl. Gedongkuning, Banguntapan Bantul, Yogyakarta

Office Yogyakarta : 087777899993

Marketing : 088221740145

Instagram : @ypad_penerbit

Website : <https://ypad.store>

Email : teampenerbit@ypad.store

Cetakan Pertama Juli 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku yang berjudul “Manajemen Keuangan daerah : teori dan praktik” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai respons atas kompleksitas dan dinamika pengelolaan keuangan daerah di era desentralisasi fiskal yang menuntut transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas publik yang tinggi.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen krusial dalam mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu mengelola anggaran secara profesional, tetapi juga menjamin keterbukaan informasi publik serta akuntabilitas terhadap setiap rupiah yang dikelola. Oleh karena itu, pembahasan dalam buku ini mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari reformasi kebijakan fiskal, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, hingga penguatan sistem akuntabilitas berbasis teknologi informasi.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi pemerintahan, mahasiswa, serta seluruh pihak yang memiliki perhatian pada tata kelola keuangan publik. Dengan menggabungkan teori, kebijakan, dan praktik lapangan, buku ini menyajikan analisis yang komprehensif dan aplikatif dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen keuangan daerah di Indonesia.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan semangat selama proses penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan keilmuan dan praktik manajemen keuangan sektor publik, khususnya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH	1
A. Pengertian Manajemen Keuangan Daerah	1
B. Tujuan dan Fungsi Keuangan Daerah.....	3
C. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Publik	4
D. Peran Keuangan Daerah dalam Pembangunan	5
BAB 2 KERANGKA HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7
A. Undang-Undang yang Mengatur Keuangan Daerah	8
B. Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah	10
C. Peraturan Pemerintah dan Permendagri Terkait	11
D. Implementasi Hukum dalam Praktik Keuangan Daerah ...	12
BAB 3 STRUKTUR DAN SUMBER PENDAPATAN DAERAH	15
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16
B. Dana Perimbangan dan Transfer Pusat	18
C. Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus	20
D. Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah.....	21
BAB 4 PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	24
A. Siklus dan Proses Penyusunan APBD	25
B. Prinsip Penyusunan APBD	26
C. Peran DPRD dalam Proses Anggaran.....	28

D.	Evaluasi dan Pengesahan APBD	29
BAB 5	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH	31
A.	Integrasi antara RPJMD, RKPD, dan APBD.....	32
B.	Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja	33
C.	Tahapan Perencanaan Program dan Kegiatan	34
D.	Kendala dalam Perencanaan dan Penganggaran.....	35
BAB 6	PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH.....	37
A.	Prosedur Pelaksanaan Anggaran.....	38
B.	Penatausahaan Keuangan oleh SKPD	39
C.	Penggunaan Dana Sesuai Perencanaan.....	40
D.	Kendala Pelaksanaan dan Solusinya.....	41
BAB 7	PENGELOLAAN KAS DAERAH	43
A.	Fungsi dan Mekanisme Bendahara Umum Daerah	44
B.	Manajemen Kas dan Likuiditas	45
C.	Pengendalian dan Monitoring Pengeluaran	46
D.	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	47
BAB 8	PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH	49
A.	Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	50
B.	Tahapan dan Prosedur Pengadaan	51
C.	Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas.....	53
D.	Praktik Pengadaan	54
BAB 9	AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	56

A.	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).....	57
B.	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	58
C.	Neraca dan Laporan Operasional.....	59
D.	Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.....	60
BAB 10 PEMERIKSAAN DAN AUDIT KEUANGAN		
DAERAH		63
A.	Peran BPK dan APIP dalam Audit Daerah	64
B.	Jenis dan Tujuan Audit Keuangan	65
C.	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.....	66
D.	Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	67
BAB 11 MANAJEMEN RISIKO DALAM KEUANGAN		
DAERAH		69
A.	Identifikasi Risiko dalam Pengelolaan Keuangan	70
B.	Strategi Mitigasi Risiko Keuangan.....	71
C.	Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal.....	72
D.	Studi Kasus Risiko dan Solusi di Daerah	73
BAB 12 PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN		
KEUANGAN DAERAH		75
A.	Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik.....	76
B.	Mekanisme Musrenbang dan Aspirasi Masyarakat	77
C.	Peran LSM dan Media dalam Pengawasan	78
D.	Inovasi Partisipatif dalam Proses Anggaran	80
BAB 13 INOVASI DAN DIGITALISASI KEUANGAN		
DAERAH		81
A.	Transformasi Digital dalam Administrasi Keuangan.....	82
B.	Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).....	82

C.	Implementasi E-Budgeting dan E-Planning	83
D.	Dampak Digitalisasi terhadap Efisiensi.....	84
BAB 14	STUDI KASUS PRAKTIK PENGELOLAAN	
	KEUANGAN DAERAH	86
A.	Studi Kasus Keberhasilan Pengelolaan APBD	87
B.	Praktik Baik Penguatan PAD	88
C.	Permasalahan Umum di Pemerintah Daerah	89
D.	Analisis Strategi Perbaikan Tata Kelola	90
BAB 15	MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH.....	91
A.	Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah	92
B.	Isu Strategis dan Dinamika Kebijakan Fiskal.....	93
C.	Sinergi Pusat dan Daerah dalam Tata Kelola.....	95
D.	Penguatan Akuntabilitas dan Efektivitas	96
PROFIL PENULIS.....		102

BAB 1

MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

Manajemen Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Manajemen ini mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga audit keuangan oleh lembaga yang berwenang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam era otonomi daerah, manajemen keuangan yang efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia yang kompeten, serta sistem informasi keuangan yang andal untuk mendukung proses pengelolaan keuangan yang profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

A. Pengertian Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen Keuangan Daerah adalah suatu proses pengelolaan seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban anggaran, yang dilakukan secara sistematis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Dalam konteks ini, manajemen keuangan daerah bukan hanya soal penganggaran dan pembelanjaan dana, tetapi juga mencakup bagaimana dana publik dikelola secara profesional guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Manajemen keuangan yang baik akan membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal, mengurangi ketergantungan pada dana pusat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian, pemahaman terhadap prinsip dan praktik manajemen keuangan daerah menjadi sangat penting bagi aparatur pemerintah, pengambil kebijakan, dan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan publik.

Dalam praktiknya, manajemen keuangan daerah mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan secara optimal demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses manajemen ini juga harus selaras dengan prinsip-prinsip akuntabilitas publik dan efisiensi penggunaan sumber daya, agar tidak terjadi pemborosan, penyimpangan, atau praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penting bagi

setiap elemen pemerintah daerah untuk memiliki kompetensi dan integritas dalam menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran daerah.

Di samping itu, keberhasilan manajemen keuangan daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam membangun sistem informasi keuangan yang terintegrasi, menerapkan standar akuntansi pemerintahan, serta meningkatkan transparansi kepada masyarakat melalui penyajian laporan keuangan yang terbuka dan mudah diakses publik. Dengan sistem yang akurat dan terbuka, masyarakat dapat turut serta mengawasi dan menilai kinerja keuangan daerah, sehingga tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, manajemen keuangan daerah tidak dapat dipisahkan dari komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, berorientasi pada hasil, dan berkeadilan sosial.

B. Tujuan dan Fungsi Keuangan Daerah

Tujuan utama dari manajemen keuangan daerah adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya sistem manajemen keuangan yang baik, pemerintah daerah dapat merencanakan dan menggunakan anggaran secara tepat sasaran, menghindari pemborosan, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan merata. Selain itu,

manajemen keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dan memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan secara internal.

Secara fungsional, manajemen keuangan daerah berperan dalam berbagai aspek strategis, mulai dari perencanaan anggaran (budgeting), pelaksanaan anggaran (budget execution), hingga pengawasan dan evaluasi anggaran (budget control and audit). Fungsi-fungsi tersebut mencakup penyusunan kebijakan fiskal daerah, pengumpulan pendapatan daerah, pengalokasian belanja sesuai prioritas pembangunan, serta pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Selain itu, manajemen keuangan daerah juga berfungsi sebagai alat pengendali kinerja organisasi pemerintahan melalui indikator keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Dengan demikian, manajemen keuangan daerah bukan hanya sekadar kegiatan administratif, melainkan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

C. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Publik

Pengelolaan keuangan publik, termasuk di dalamnya keuangan daerah, harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang menjamin terciptanya tata kelola yang baik dan bertanggung jawab. Prinsip pertama adalah transparansi, yaitu keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dengan transparansi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran

digunakan dan sejauh mana pencapaiannya terhadap tujuan pembangunan. Prinsip kedua adalah akuntabilitas, yaitu keharusan bagi pengelola keuangan untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dana publik secara moral dan hukum. Akuntabilitas menjadi dasar dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Prinsip ketiga adalah efisiensi dan efektivitas, yang berarti bahwa setiap penggunaan anggaran harus dapat menghasilkan manfaat sebesar-besarnya dengan biaya serendah-rendahnya. Anggaran yang dikeluarkan harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan tidak terbuang sia-sia. Prinsip keempat adalah keterpaduan dan sinkronisasi, yang menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan yang selaras dengan perencanaan pembangunan serta kebijakan nasional dan daerah. Selain itu, terdapat prinsip kewajaran dan keadilan, yang menuntut agar distribusi anggaran dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, serta memperhatikan kelompok rentan dan daerah tertinggal. Terakhir, prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum yang tidak boleh diabaikan dalam setiap pengambilan keputusan anggaran.

D. Peran Keuangan Daerah dalam Pembangunan

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, keuangan daerah menjadi sumber daya vital yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan

pembangunan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, hingga perlindungan sosial. Melalui pengelolaan anggaran yang tepat dan terencana, pemerintah daerah dapat mengatasi berbagai permasalahan lokal serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara efektif. Dengan demikian, keuangan daerah berperan sebagai katalisator dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Lebih jauh lagi, peran keuangan daerah juga tampak dalam mendorong kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan dana transfer, serta penataan belanja yang produktif dan efisien. Dalam konteks otonomi daerah, keuangan menjadi simbol sekaligus alat ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu merancang kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berorientasi pada hasil (outcome-based), serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang. Keuangan daerah yang dikelola dengan baik akan memperkuat fondasi pembangunan, memperluas akses pelayanan publik, dan menciptakan iklim investasi yang sehat di daerah. Oleh karena itu, manajemen keuangan yang profesional, transparan, dan partisipatif menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh.

PROFIL PENULIS



Nama : Moh. Rasyid, S.E., M.M

Tempat Tanggal Lahir :
Salumpaga, 14 Agustus 1980

Latar Belakang Pendidikan:

S.E. (Sarjana Ekonomi) dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE).Mujahidin Tolitoli.

M.M (Magister Manajemen) dari Universitas Tadulako (UNTAD) Palu

Pengalaman Kerja :

Dosen di Prodi Pembangunan Ekonomi Dan Prodi Manajemen, STIE Mujahidin Tolitoli.

Peneliti di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIE Mujahidin Tolitoli.

Instruktur Komputer di Lembaga Kursus Komputer di LKP Nuansa Komputer Tolitoli, LKP Creatif Computer Tolitoli dan Balai Latihan Kerja (BLK) Tolitoli

MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH : TEORI DAN PRAKTIK



Moh. Rasyid, S.E., M.M